

el-Ijtima'

Media Komunikasi Pengembangan Masyarakat Madani

- Pemberdayaan Sebagai Upaya Meningkatkan Keberhasilan Usaha Ekonomi Rakyat
Chamdan Purnama
- Strategi Memerangi Kemiskinan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal pada Era Desentralisasi
Suyanto
- Tahap-Tahap Gerakan Sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam Melawan Penggusuran
Soenyono
- Beberapa Kendala dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia
Sri Warjiyati
- Benturan Pemikiran dan Praksis Keagamaan dalam Ranah Ideologi Keindonesiaan
Nur Syam
- Pengadaan Air Bersih Warga Lamongan dengan Pemanfaatan Biji Mengkudu & Karbon Aktif
Arik Alfiah
- Manajemen Pembelajaran Berbasis Perpustakaan
Imas Maesaroh
- Pengaruh Pandangan dan Lingkungan Masyarakat terhadap Cerita Rakyat Sunda
Asep Abbas Abdullah

Diterbitkan Oleh:
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
IAIN Sunan Ampel
2007

el-Ijtima'

Media Komunikasi Pengembangan Masyarakat Madani

Jurnal el-Ijtima' ini merupakan media informasi komunikasi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu semua artikel dalam format kajian ilmiah, action research, applied research, temuan-temuan pengembangan wilayah terpadu, hasil pengabdian di bidang teknologi tepat guna terapan dan metode pengembangan masyarakat harus relevan dengan visi dan misi jurnal ini. Penulis dapat menggunakan perspektif sosial-keagamaan, seni-budaya, ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan ekologi.

Pembina

H.M. Ridwan Nasir

Penanggung Jawab

H. Thoha Hamim

Pengarah

H. Nur Syam

Hj. Shofiyah Asmu

Pemimpin Redaksi

H. A. Isa Anshori

Penyunting

H. Suis Qoim Abdullah

Agus Affandi

Abd. Basith Junaedy

Abd. Kholik

Asep Abbas Abdullah

Hadi Susanto

Penyunting Ahli

H. Syafiq A. Mughni H. Ali Aziz

Aminuddin Kasdi

Staf Redaksi

Saiful Jazil

Dra. Lutfi Aminah

Djoko Siswoyo

Muayyadatul Masrury

Ikhwan Priyantono

Emy Tyartiani

Sahuri

Mohammad Nasir

Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sunan Ampel dibawah pembina: Prof. Dr. H.M. Ridwan Nasir, MA.; Penanggung Jawab: Dr. H. Thoha Hamim, MA. ; Pengarah: Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., Dra. Hj. Shofiyah Asmu, M.Si

Daftar Isi

Daftar Isi (i)

Dari Redaksi (ii)

- ❖ Pemberdayaan Sebagai Upaya Meningkatkan Keberhasilan Usaha Ekonomi Rakyat
Chamdan Purnama (1-20)
- ❖ Strategi Memerangi Kemiskinan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal pada Era Desentralisasi
Suyanto (21-38)
- ❖ Tahap-Tahap Gerakan Sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam Melawan Penggusuran
Soenyono (39-51)
- ❖ Beberapa Kendala dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia
Sri Warjiyati (52-63)
- ❖ Benturan Pemikiran dan Praksis Keagamaan dalam Ranah Ideologi Keindonesiaan
Nur Syam (64-70)
- ❖ Pengadaan Air Bersih Warga Lamongan dengan Pemanfaatan Biji Mengkudu & Karbon Aktif
Arik Alfiah (71-80)
- ❖ Manajemen Pembelajaran Berbasis Perpustakaan
Imas Maesaroh (81-90)
- ❖ Pengaruh Pandangan dan Lingkungan Masyarakat terhadap Cerita Rakyat Sunda
Asep Abbas Abdullah (91-102)

STRATEGI MEMERANGI KEMISKINAN DENGAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PADA ERA DESENTRALISASI

Suyanto*

Abstract: The definition of poverty is considered in many points of view, as a consequence, the definition, causes and measurement of poverty indicator are different. Fighting poverty can be realized by the development of local economic means, in forming corporation, from any one who has competence for prevention of poverty which is based on basic principles in the success of local economic development, that are consistent decentralization, good governance, good corporate governance, activity of pro-poor society, equality of gender, and continual contraction. The implementation of local economic development is done by forming interesting power of region through stabilization of investment climate and local economic dynamism, increasing to human resource, promoting commodity, image, and superior product in region, forming the self power, that is diversification effort and transformation of product, developing ability to business, increasing asset of economic resource and developing social capital, and forming the power of competition in increasing of productivity, efficiency of resource of poor population to market, supporting continual of product and regional partnership.

Keyword: Kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, daya tarik, daya tahan dan daya saing daerah, desentralisasi berbasis pro-penduduk miskin.

Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Pandangan tentang pengertian kemiskinan memiliki multidefinisi. Kemiskinan selalu menjadi dilema, serta berbagai ragam penyebab dan akibat yang ditimbulkannya. Kondisi sumber daya alam, seperti rendahnya kesuburan tanah, kekurangan air akibat rendahnya curah hujan

* Dosen Universitas Dr. Soetomo Surabaya

dengan pola distribusi curah hujan yang tidak menentu, terbatasnya akses terhadap lahan beririgasi dan gangguan hama penyakit tanaman merupakan kendala serius yang dihadapi penduduk di berbagai daerah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat setempat menjadi miskin. Berbagai upaya pengembangan ekonomi lokal masyarakat setempat harus dilakukan agar kemiskinan di daerah bisa dientaskan.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memperluas ruang partisipasi publik di daerah, mulai peran serta dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan dan pengawasan anggaran pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam membangun kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Melalui peningkatan partisipasi publik yang lebih baik diharapkan penggunaan anggaran sosial publik semakin pro-penduduk miskin (*pro-poor*).

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian, penyebab serta indikator kemiskinan dipandang menurut beberapa pihak?
2. Bagaimana pengembangan ekonomi lokal harus dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan pada pemerintah kabupaten/kota.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan mengkaji secara konseptual pengertian kemiskinan, faktor-faktor penyebab, beberapa indikator kemiskinan, serta strategi yang dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan pada pemerintah kabupaten/kota.

Tujuan lain penelitian ini adalah merangkaikan konsep pemikiran dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal melalui : (i) peningkatan daya tarik; (ii) peningkatan daya tahan (*resilience*); serta (iii) peningkatan daya saing daerah sebagaimana hasil penelitian Dendi dkk (2004) dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT dan NTB.

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini dapat diketahui beberapa pengertian kemiskinan, faktor-faktor penyebab, indikator, serta strategi yang dilakukan dalam

- pengentasan kemiskinan pada pemerintah kabupaten/kota.
- Dari penelitian ini dapat diketahui strategi pengembangan ekonomi lokal melalui : (i) peningkatan daya tarik; (ii) peningkatan daya tahan (*resilience*); serta (iii) peningkatan daya saing daerah dalam pengentasan kemiskinan pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian Dendi dkk (2004) untuk kasus penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT dan NTB.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ilmu sosial secara umum dikenal 3 (tiga) tipe penelitian, yaitu penelitian eksploratif (*explorative research*), penelitian deskriptif (*descriptive research*), serta penelitian penjelasan (*explanatory research*). Umumnya sebagian besar penelitian bersifat penelitian penjelasan (*explanatory research*) yaitu suatu penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh antar variabel yang ada. Penelitian sosial adalah bersifat deskriptif (*descriptive research*), yaitu mengkaji dan menganalisis secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti, sehingga penelitian deskriptif analitik adalah penelitian yang ditujukan pada pemecahan masalah dengan penekanan pada studi kasus. Atas dasar penjelasan tersebut, penelitian ini termasuk studi kasus menanggulangi kemiskinan dalam era otonomi dan desentralisasi.

2. Rancangan penelitian

Menurut Zainuddin (2000) rancangan penelitian dapat diartikan rencana bagaimana cara mengumpulkan dan menganalisis data untuk memberi arti terhadap data tersebut secara efisien dan efektif. Dalam artian ini, maka rancangan penelitian meliputi tahapan penentuan alat (instrumen) pengambilan data yang digunakan, cara pengumpulan, pengaturan dan analisis data yang akan digunakan serta pemberian kesempatan atas hasil analisis yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji secara komprehensif menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal di era desentralisasi.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik, Bappeda, Jurnal-Jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah serta hasil publikasi ilmiah lainnya. Data-data yang diambil dalam penelitian ini adalah semua data yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

4. Tempat & Waktu Penelitian

Penelitian ini difokuskan terhadap penganganan masalah kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Timur semenjak pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal setelah diberlakukannya UU No. 22/1999 & UU No. 25/1999 yang direvisi menjadi UU No. 32/2004 & UU No. 33/2004. Upaya penanganan kemiskinan ini dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal pada setiap kabupaten/kota.

Definisi, Faktor Penyebab dan Pengukuran Indikator Kemiskinan

1. Multidefinisi Kemiskinan

Pengertian kemiskinan dapat dilihat menurut sudut pandang berbagai pihak, sehingga pandangan tentang kemiskinan sangat bervariasi. Setidaknya, kini banyak lembaga yang menangani kemiskinan, antara lain BPS, BKKBN, Bank Dunia.

Menurut BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. BKKBN melihat kemiskinan dari sudut pandang suatu keluarga miskin prasejahtera, yaitu, apabila : a). Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya b). Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari c). Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian d). Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah e). Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Bank Dunia memandang kemiskinan karena keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1 per hari.

Secara lokal maupun nasional, kemiskinan mempunyai empat dimensi pokok, yaitu : (1) kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*); (2) rendahnya kemampuan (*low of capabilities*); (3) kurangnya jaminan

(*low-level of security*); dan (4) ketidakberdayaan (*low of capacity or empowerment*).

Kuncoro (2000: 102-103), menyatakan, bahwa kemiskinan setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu; pertama : Kemiskinan absolut yang diidentifikasi berdasarkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua; Kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Berdasarkan pola waktunya kemiskinan dapat dibedakan menjadi: *persistent poverty*, *cyclical poverty*, *seasonal poverty*, serta *accidental poverty*. *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Umumnya menimpa wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang kritis dan atau terisolasi. *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti yang terjadi pada usahatani tanaman pangan dan nelayan. Pola yang lain adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Belakangan ini banyak peneliti yang tertarik terhadap masalah kemiskinan dari berbagai latar belakang. Sudut pandang mereka bervariasi. Sebagian peneliti menyatakan, bahwa penduduk miskin erat kaitannya dengan wilayah miskin, wilayah dengan potensi daerah yang tertinggal.

Peneliti lainnya mempunyai sudut pandang, bahwa terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Hal ini disebabkan oleh keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha.

dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata pula.

Secara umum penyebab kemiskinan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, antara lain: 1) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan maupun lembaga yang ada di masyarakat sehingga dapat menghambat peningkatan produktivitas dan mobilitas masyarakat; 2) Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan adanya nilai-nilai yang tidak produktif dalam masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk; dan 3) Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang ditunjukkan oleh kondisi alam maupun geografis yang tidak mendukung, misalnya daerah tandus, kering, maupun keterisolasi daerah.

3. Indikator Kemiskinan

Selama ini dalam mengukur kemiskinan sering dikaitkan dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu, sehingga ketimpangannya mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat.

Dari pandangan diatas, kemiskinan sering didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Hal ini menyiratkan tiga pertanyaan dasar, yaitu bagaimana mengukur standar hidup? apakah yang dimaksudkan dengan standart hidup minimum? Serta indikator sederhana yang bagaimana yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit?

Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu : (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Namun *Headcount Index* belum dapat mengatasi adanya kesenjangan kemiskinan pendapatan atau *poverty gap* (Meier, 1995 : 26). *Poverty gap* adalah menghitung transfer yang akan membawa pendapatan setiap penduduk miskin hingga tingkat diatas garis kemiskinan, agar kemiskinan dapat dilenyapkan (Kuncoro, 2000: 104-105).

Untuk mengidentifikasi kemiskinan sering menggunakan garis kemiskinan (*poverty line*), yaitu suatu tolok ukur yang menunjukkan ketidakmampuan penduduk melampaui ukuran garis kemiskinan atau suatu ukuran yang didasarkan pada kebutuhan atau pengeluaran konsumsi minimum, misalnya konsumsi pangan dan konsumsi nonpangan.

Strategi Memerangi Kemiskinan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut (Dendi dkk, 2004), bahwa dalam penanggulangan kemiskinan setidaknya harus ada kebijaksanaan yang dituangkan dalam tiga arah kebijaksanaan. *Pertama*, kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan kepada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; *kedua*, kebijaksanaan langsung yang ditujukan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; *ketiga*, kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program menanggulangi kemiskinan.

Menurut Gtz (2004), menyatakan, bahwa pengembangan ekonomi lokal setidaknya memiliki arah dan tujuan untuk mendorong ekonomi lokal agar tumbuh dan menciptakan tambahan lapangan kerja; mendayagunakan sumber daya lokal yang tersedia secara lebih baik; menciptakan ruang dan peluang untuk penyelarasan suplai dan permintaan, serta mengembangkan peluang-peluang baru bagi bisnis. Program pengembangan ini tentu saja membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak yang kompeten dengan penanggulangan kemiskinan.

Beberapa prinsip dasar keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal

- 1. Pelaksanaan Desentralisasi yang konsisten**

Desentralisasi pemerintahan dapat dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pembangunan daerah (Alisahbana, 2000). Bila otonomi daerah dibarengi dengan komitmen dan kebijakan deregulasi yang sehat, partisipasi masyarakat dalam pasar yang sesungguhnya akan meningkat dan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi perbaikan kehidupan maupun ekonomi masyarakat.

Untuk menciptakan kebijakan deregulasi yang sehat, pemerintah daerah dan sektor swasta serta masyarakat harus mengintensifkan dialog, memberikan masukan kepada pemerintah pusat melalui jalur birokrasi maupun melalui platform formal partisipasi publik yang ada maupun melalui media massa dan dialog-dialog informal *stakeholder*. Hal ini dapat dilakukan bila komunikasi tersebut dapat berjalan efektif.

2. Good Governance / Good Corporate Governance

Good governance (kepemerintahan yang baik) secara konsisten pada seluruh tingkatan administrasi akan dapat menghasilkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, agar terhindar dari ekonomi biaya tinggi. Hal ini penting untuk menarik minat investor. Prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan daerah, yakni (1) partisipasi warga negara dalam proses penyusunan kebijakan; (2) penegakan hukum; (3) transparansi; (4) pemerataan; (5) ketanggapan; (6) visi yang strategis; (7) akuntabilitas terhadap publik; (8) profesionalisme; (9) efisiensi dan efektivitas, artinya penggunaan sumberdaya secara optimal untuk pelayanan publik; dan (10) supervisi, yakni penerapan pengawasan yang lebih ketat terhadap administrasi publik dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan melibatkan para *stakeholders*. Kondisi ini dapat dilaksanakan bila kesadaran terhadap pembangunan ekonomi daerah tumbuh pada masyarakat (Kuncoro, 2004).

3. Pro-Masyarakat Miskin

Program pengembangan ekonomi lokal harus mengutamakan partisipasi masyarakat miskin terutama kegiatan-kegiatan dalam rantai produksi dan pemasaran, sehingga setidaknya tidak sekedar efek menetes-kebawah (*trickle-down effects*), agar kesejahteraan masyarakat miskin meningkat.

Konsep pro-masyarakat miskin mementingkan prinsip pokok, pada: (i) investasi pada peningkatan sumber daya manusia dan modal sosial penduduk miskin; (ii) kebijakan dan pelayanan yang menghasilkan tersedianya secara luas dan berkelanjutan kebutuhan dasar masyarakat (akses pangan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan); (iii) kebijakan dan pelayanan yang mengurangi biaya-biaya transaksi sehingga membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan

dan/atau nilai tambah dari usaha sendiri; (iv) peningkatan akses masyarakat miskin kepada sumber daya ekonomi (modal, lahan/ ruang, sarana produksi, informasi pasar, dan lain-lain); dan (v) pembangunan yang ramah lingkungan, yang memelihara atau bahkan memperbaiki fungsi ekologi dan kapasitas sumber daya alam untuk berproduksi (Dendi dkk, 2004).

4. Kesetaraan Gender

Pembangunan gender telah menjadi isu lintas sektor. Salah satu fokus isu gender adalah pada kesetaraan akses dan kontrol laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan pasar tenaga kerja. Apapun inisiatif pengembangan ekonomi lokal, harus ditelaah terlebih dahulu manfaat atau kerugiannya baik bagi laki-laki maupun perempuan, contohnya adalah revolusi hijau (Dendi dkk, 2004)

5. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menekankan kemanunggalan (*inclusiveness*) pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan mekanisme pasar dengan kelembagaan (hukum / perundang-undangan, norma sosial, reward dan sanksi) untuk membentuk perilaku dan tindakan sektor publik, swasta dan non-pemerintah dalam mengelola pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang padat ilmu (*knowledge-intensive*), yang mensubstitusi modal dengan ilmu. Penggunaan agen hayati (musuh alami) untuk pengendalian hama tanaman tertentu, yang menggantikan penggunaan pestisida, merupakan contoh kongkrit bagaimana ilmu menggantikan modal. Pembangunan berkelanjutan sangat menekankan pentingnya pembangunan hemat sumber daya dan energi, sehingga penggunaan energi yang dapat diperbaharui (*renewable energy*) serta konservasi sumber daya alam perlu diintensifkan.

Komponen Pokok Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Lokal

1. Membangun Daya Tarik

Membangun daya tarik investasi dan bisnis di daerah setidaknya

terdapat tiga komponen strategis yang harus diperhatikan, yaitu penyehatan iklim investasi dan dinamisme ekonomi daerah, keberadaan dan citra komoditi/produk unggulan, serta ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif (sumber daya manusia). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a). Penyehatan Iklim Investasi dan Dinamisme Ekonomi Daerah

Dalam pengembangan ekonomi lokal, pembuat kebijakan dan masyarakat setempat harus memahami faktor-faktor yang menentukan sehat atau tidaknya iklim bisnis menurut kacamata investor atau pengusaha, agar kebijakan maupun pelayanan dapat diarahkan untuk menciptakan kondisi-kondisi tersebut.

Faktor biaya; Kebijakan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi akan mengganggu minat investor melakukan ekspansi bisnis, serta membatasi partisipasi penduduk miskin pada pasar. Kondisi yang dapat menunjang minat investor untuk melakukan investasi di daerah, yakni (i) sistem perizinan dan perpajakan yang transparan dan efisien; (ii) tersedianya infrastruktur (transportasi, telekomunikasi, energi dan air) yang efisien dan cukup; (iii) tenaga kerja lokal yang kompetitif; dan (iv) citra dan persepsi budaya *good governance*.

Faktor dinamisme ekonomi, bahwa kebijakan desentralisasi yang diiringi dengan deregulasi yang kohesif akan mendukung mekanisme pasar sehingga dapat menjadi daya tarik, daya tahan maupun daya saing ekonomi daerah. Jadi investor akan melihat faktor penunjang keberhasilan bisnisnya yang merupakan faktor dinamisme ekonomi daerah, yang memiliki kriteria berupa: (i) potensi ekonomi dan (ii) struktur ekonominya. Kriteria yang pertama biasanya menggunakan indikator produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita karena indikator tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kriteria kedua, yakni struktur ekonomi, menggunakan indikator nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi (nilai tambah sektoral) yang terdapat di daerah. Investor akan dapat melihat potensi unggulan (basis ekonomi), sekaligus pengalaman daerah, apakah pada sektor primer, sektor sekunder (industri) atau pada sektor jasa.

b). Peningkatan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha adalah faktor penting daya tarik investasi di daerah. Namun kualifikasi saja tidak cukup. Persaingan mengutamakan produktifitas dan efisiensi. Konsekuensinya, tingkat upah/kebijakan upah juga menjadi penentu daya tarik investasi. Peningkatan sumber daya manusia dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal, jalur pendidikan informal/pelatihan kejuruan (*vocational training*).

c). Mempromosikan Citra Komoditi dan Produk Unggulan daerah

Berbagai produk unggulan harus dipacu pertumbuhannya agar bisa menjadi *trade mark* bagi daerah. Hal ini pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat daerah. Untuk penciptaan daya tarik (investasi) di daerah, penting diperhatikan tidak saja komoditi / produk dan jasa apa yang dapat menjadi unggulan daerah tetapi juga ciri khas apa yang bisa dijadikan citra (*distinctive competitiveness*) dari komoditi / produk maupun jasa tersebut.

Prinsip pengembangan ekonomi lokal yang *pro-poor*, pemilihan produk unggulan menggunakan potensi nilai tambah langsung suatu komoditi / produk bagi keluarga miskin sebagai kriteria penting, disamping kriteria kelayakan teknis, permintaan pasar, serta efek multiplier suatu komoditi / produk sektoral terhadap sektor usaha lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa hanya komoditi atau produk yang telah ada sekarang ini yang dapat dijadikan unggulan daerah. Komoditi baru yang potensial diadopsi, serta berpotensi menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah maupun masyarakat miskin dan lingkungan, dapat dikembangkan sebagai unggulan daerah.

Membangun Daya Tahan

Konsep daya tahan (*resilience*) diadopsi dari pemikiran para ahli ekologi yang melihat ekonomi sebagai satu ekosistem (*ecological nation*) yang berusaha memaksimalkan nilai jangka panjang dari sumber daya lahan yang terbatas dengan mengembangkan sistem-sistem berbasis hayati yang saling bergantung (*interdependence*). Keanekaragaman dan kesalingtergantungan spesies dan lingkungan merupakan faktor penting untuk membangun

produktivitas dan daya tahan sistem dalam jangka panjang.

Daya tahan (*resilience*) merupakan konsep yang dinamis, dan secara sederhana dapat dijelaskan bahwa daya tahan ekonomi merupakan daya menyesuaikan diri serta memulihkan diri sektor ekonomi dari tekanan-tekanan faktor ekonomi maupun non-ekonomi dalam lingkungan yang senantiasa berubah dimana peluang dan resiko dapat muncul setiap saat, setiap unit ekonomi baik rumah tangga, perusahaan maupun daerah, perlu mempersiapkan diri.

a). Diversifikasi Usaha dan Transformasi Produk

Diversifikasi mencakup penganekaragaman jenis komoditi maupun penganekaragaman bidang usaha (*entreprise*), sedangkan transformasi produk dalam artian sempit merupakan perubahan bentuk atau struktur produk. Diversifikasi maupun transformasi produk diharapkan; (i) agar pengusaha mikro dan kecil menengah (UMKM) maupun sektor swasta di daerah mampu meminimalkan resiko kegagalan secara umum; (ii) mempertahankan diri dari ancaman produk luar maupun produk substitusi yang masuk pasar; dan (ii) menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah bagi masyarakat lokal khususnya dan perekonomian daerah umumnya. Pilihan diversifikasi atau transformasi produk atau bahkan kombinasi keduanya seyogyanya mempergunakan kriteria teknis dan non-teknis, antara lain: (i) faktor kesesuaian dan resiko alami yang sulit dikontrol petani/pengusaha (iklim, hama penyakit); (ii) keseimbangan permintaan dan penawaran, termasuk kaitannya dengan skala ekonomi; (iii) kapasitas dan prioritas rumah tangga tani (pengusaha); (iv) kebudayaan setempat.

b). Pengembangan Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan mengeksplorasi inovasi untuk menciptakan nilai yang tidak bisa selalu diukur dengan ukuran-ukuran keuangan saja (Wickham, 2001). Wirausahawan sangat peduli dengan potensi untuk berubah. Potensi untuk berubah tersebut berada pada tiga dimensi (Wickham, 2001) yakni (i) dimensi keuangan (potensi menciptakan nilai baru); (ii) dimensi personal (potensi mencapai tujuan-tujuan personal, tidak hanya uang semata); dan (iii) dimensi sosial (potensi melakukan perubahan struktural).

upaya-upaya ini akan menjadi bagian integral dari strategi

pengembangan ekonomi lokal, yaitu: (i) Membangun budaya demokrasi untuk meningkatkan efektifitas partisipasi dan daya tawar perorangan maupun kolektif (*collective bargaining power*) dalam segala bidang, meliputi ekonomi, sosial budaya dan politik. (ii) Pemerintah mengembangkan struktur dan fasilitas untuk meningkatkan akses masyarakat kepada informasi dan kemampuan menganalisa informasi ekonomi dan bisnis, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dipergunakan secara tepat dan efisien, serta (iii) Mendukung perubahan struktur pemasaran untuk menciptakan rantai suplai yang lebih kompetitif dan efisien. Salah satu peluang penting dalam hal ini adalah membentuk organisasi-organisasi produsen, misalnya asosiasi, koperasi atau model-model lain yang sesuai dengan kerangka legal formal yang berlaku.

c). Peningkatan Akses Sumber Daya Ekonomi dan Pengembangan Modal Sosial

1). Akses pada Lahan dan Ruang

Kepemilikan lahan yang relatif sempit, merupakan salah satu faktor pembatas utama penciptaan skala ekonomi dan nilai tambah di pedesaan.

2). Peningkatan Ketersediaan Modal yang Terjangkau

Untuk meningkatkan akses modal bagi pelaku UMKM dan masyarakat miskin dapat dilakukan beberapa strategi, antara lain :

a). Modal dana bergulir (*revolving fund*).

Dewasa ini beberapa organisasi pemerintah maupun non-pemerintah telah menerapkan konsep *revolving fund* dengan tingkat keberhasilan yang sangat beragam. Dana bergulir ini diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin atau kelompok usaha mikro untuk memulai maupun mengembangkan usaha produktif. Secara konseptual dana bergulir akan digulirkan kepada kelompok lain dalam desa yang sama. Agar perlakuan dana benar-benar berjalan secara efektif dan efisien, perlu dirumuskan konsep kepemilikan yang jelas, serta diciptakan struktur kelembagaan yang akan mengelola perlakuan dana tersebut.

b). Menjembatani hubungan kelompok dengan Bank.

Strategi ini direalisasikan melalui pengembangan dan

pemberdayaan lembaga-lembaga keuangan perantara (*intermediary institution*). Model kelembagaan yang sesuai dengan kerangka legal formal yang ada sekarang ini adalah Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Serba Usaha yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Lembaga-lembaga dapat memperoleh kredit dari sektor perbankan dan kemudian menyalirkannya kepada anggota-anggotanya atau para nasabahnya dengan bunga komersial, tetapi dengan persyaratan yang lebih fleksibel.

3). Pengembangan Modal Sosial

Dewasa ini konsep modal sosial semakin populer. Lembaga-lembaga internasional, misalnya Bank Dunia telah mengakui pentingnya modal sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa dimensi penting dari modal sosial sangat relevan dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, yaitu : (i) norma-norma sosial dan agama yang secara turun-temurun telah membentuk pandangan, perilaku (moral) dan tindakan masyarakat; (ii) jaringan kerja (*networks*) yang dibentuk dan dipelihara oleh masyarakat untuk mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi dengan prinsip tolong menolong, dan saling menghargai; (iii) kesalingpercayaan (*trust*) anggota masyarakat yang terbentuk dalam proses interaksi sosial.

Membangun Daya Saing

Membangun daya saing berhubungan erat dengan strategi membangun daya tarik dan daya tahan. Keberhasilan strategi membangun daya tarik dan daya tahan bisnis dan ekonomi merupakan prasyarat bagi keberhasilan strategi membangun daya saing.

a). Peningkatan Produktifitas, Efisiensi sumber daya si miskin menuju pasar

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan pendekatan "padat karya" yang mengintegrasikan konsep "food-for-work" dan aktifitas simpan pinjam kelompok. Hasil tabungan mereka dapat membeli peralatan pertanian untuk menunjang kegiatan tani, dan hasilnya dapat dijual ke pasar. Kegiatan ini meski relatif kecil, namun merupakan program pembangunan yang *pro-poor*.

b). Mendukung Keberlanjutan Inovasi Produk Unggulan

Pemerintah daerah harus menjembatani keterkaitan rantai suplai (*supply chain linkages*), antara konsumen dengan produsen, dengan cara: (i) Menyediakan secara luas kepada produsen hasil-hasil studi pasar domestik maupun pasar luar negeri; (ii) Mendukung promosi dan/atau atau integrasi produk baru ke pasar, baik pasar lokal-regional maupun pasar luar negeri.

c). Kemitraan Regional

Konsep *regional management* adalah mengintegrasikan wilayah administrasi menjadi wilayah ekonomi dalam suatu wadah kerjasama stakeholders antar daerah dibidang kebijakan ekonomi, komunikasi informasi, serta kerjasama pemasaran (*regional marketing*). Untuk itu dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 pemerintah daerah telah diberikan wewenang yang luas untuk mengatur kegiatan pembangunan ekonominya (Dendi, 2004).

Penutup

Kesimpulan

Kemiskinan dapat dipandang menurut berbagai pihak, sehingga pandangan tentang kemiskinan, baik pengertian, penyebab dan indikator kemiskinan sangat bervariasi.

Menurut BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. BKKBN melihat kemiskinan dari sudut pandang suatu keluarga miskin prasejahtera. Bank Dunia memandang kemiskinan karena keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1 per hari. Begitu juga pandangan lainnya bisa berbeda.

Saran-Saran

Perlu diupayakan konsep pengembangan dana bagi hasil antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa berdasarkan kriteria-kriteria kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan keberadaan masyarakat miskin serta kinerja pemerintahan desa.

Pengembangan pendekatan diatas diharapkan dapat memperluas partisipasi masyarakat di tingkat desa dalam merencanakan dan

melaksanakan sendiri program-program pembangunan agar mereka keluar dari kemiskinan. Konsep ini sesuai UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 212 ayat 3 yang menjamin hak-hak desa atas perolehan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino L, Erlangga, 2005, *Kinerja keuangan dan strategi pembangunan kota di era otonomi daerah: Studi kasus kota Surabaya*. Fakultas Ekonomi Univ. Airlangga, Surabaya, Indonesia. Cures Working Paper No. 05/01, Januari 2005.
- Ahmad, Jamaludin, 1990. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah; Kasus di Aceh, Jawa Timur, dan DKI Jakarta*. Disertasi (tidak dipublikasikan), Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Alisyahbana, Armida S, 2000, "Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah", Makalah, Disajikan dalam kongres ISEI tanggal 22 April 2000 di Makassar.
- Ananda, Candra Fajri, 2002. "Problem of the Implementation of fiscal Decentralization in Regional Autonomy: the Case of Malang Municipality and Trenggalek District". USAID/Indonesia. Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park. PEG project.
- Bird M, Richard and Vaillancourt, 2000, *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bahl, R. and N.McMullen. 2000. Aturan-Aturan Implementasi Desentralisasi Fiskal. Center for International Reform and The Informal Sector (IRIS). University of Maryland at College Park. March 2000.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan*, Cetakan keenam, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- _____, 2002. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Azaz Desentralisasi Fiskal. Paper disampaikan pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002, 11 Februari 2002. Jakarta.
- Devas, Nick, Binder B, Booth, A. Davey, Kelly, R, 1988, *Keuangan Pemerintah*

- Daerah di Indonesia*, UI press, Jakarta.
- Davey, Kenneth, 1989, "Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia" dalam Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. Dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta.
- _____, 2003. *Reformasi: Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta.
- Dendi, A., Heile, J.H., Mahman dkk, 2004, Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal, Kerjasama Departemen Dalamnegeri Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan gtz Deutsche Gesellschaft furTechnische Zusammernabeit (GTZ) GmbH.
- Halim, Abdul, (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Jogjakarta: UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hirawan, Susijati B, 1986. "Analisa Tentang Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*", Volume XXXIV, Nomor 1, Jakarta.
- INDEF. 2003. *Pertumbuhan Tanpa Daya Saing*. Laporan pertengahan tahun. Indef, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 1991 & 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggarannya*, Edisi I, Cetakan 2, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 1995, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan", Prisma No. 43 hlm 3-7, Jakarta.
- _____, 2000, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- _____, 2004. *Otonomi dan Pembangunan daerah: Reformasi, Perencanaan, strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kadjatmiko. 2002. Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah. Makalah Disampaikan dalam Matching National Policy Agenda with Local Fiscal Practices: International Workshop on Fiscal Desentralization. Bandung: 4-5 September 2002.
- Khusaini, Moh, 2006, Kajian Desentralisasi Fiskal, Pengaruhnya Terhadap fisiensi Ekonomi Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat, Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa

- Timur), isertasi Universitas Brawijaya (Tidak dipublikasikan).
- LPEM-FEUI, 2000. *Model Dana Alokasi Umum*, Laporan akhir pada kajian analisis penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi. LPEM-FEUI. Jakarta.
- Lembaga Penelitian Semeru. 2002. *Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah Atas Kinerja Pelayanan Publik: Kasus Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat*. Lembaga penelitian Semeru. <http://www.gtzsfdm.or.id/>.
- Lembaga Penelitian Semeru. 2002. *Mencari Alternatif Penyempurnaan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Beberapa Pelajaran dari Daerah*. Disampaikan pada Workshop: Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Lokal. Kerjasama LIPI dengan Semeru. Jakarta, 20 Agustus 2002.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 1988, *Ekonomi Publik, Suatu Analisis Teoritis*, PAU Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2001. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. BPFE. Yogyakarta.
- Mahi, R. 2002. Strategi Pembiayaan Pelayanan Publik Era Otonomi Daerah: Pengalaman Internasional dan Indonesia. *Analisis CSIS*. 31 (4): 422-435.
- Majidi, Nasith, 1997, "Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antardaerah" dalam Prisma, No. 3 Maret 1997, LPES, Jakarta.
- Mardiasmo, 2001, "Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam Era Otonomi Daerah", Makalah workshop Kerjasama SIAGA Project dan STIE Kerjasama, Yogyakarta.